



## Koordinasi Pemda dan BPOM Masih Lemah ✓

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan menemukan rendahnya hasil pengawasan BPOM pemerintah daerah setempat. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor, khususnya dukungan mitra kerja daerah terhadap BPOM.

"Membangun kemitraan pengawasan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan serta meningkatkan daya saing produk obat dan makanan," kata Kepala BPOM, Penny K Lukito kepada *Tribun Bali*, Kamis (4/5).

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM.

Koordinasi tersebut sangat dibutuhkan karena banyaknya keterbatasan dan tantangan yang dihadapi BPOM. Tantangan tersebut antara lain, fragmentasi kelembagaan serta regulasi pengawasan pusat dan daerah, koordinasi lintas sektor belum optimal, keterbatasan sumber daya, luasnya cakupan wilayah pengawasan, pertumbuhan pelaku usaha produksi dan distribusi, globalisasi dan penyelundupan produk ilegal.

Peningkatan komitmen ini akan berdampak pada semakin terlindunginya masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. "Kami berharap dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan yang diajukan BPOM," tutup Penny. (zan)

Edisi : Jumat, 5 Mei 2017

Hal : 6



# Penanggulangan Bencana Longsor

## di Petang Rp 7,4 Miliar

**MANGUPURA, TRIBUN BALI** - Komisi III DPRD Badung menggelar rapat dengan jajaran eksekutif membahas surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung tentang Pergeseran Anggaran. Juga surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badung tentang Permohonan dana Penanganan Bencana di Kantor DPRD Badung, Kamis (4/5).

Adapun kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran yaitu *pertama* pemba-

ngunan rumah layak huni akibat bencana. *Kedua*, pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin (bedah rumah). *Ketiga*, peningkatan kualitas (PK) rumah swadaya di Badung. *Keempat*, penanggulangan bencana alam longsor Desa Plaga, Semanik, Tiyingan, Sekarmukti, Tinggan dan lingkungan jembatan Bangkung.

"Intinya belanja hibah barang yang semula dirancang pada Belanja Langsung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman de-

ngan kegiatan sebagaimana disebut pada nomor 1 dan 3 dimohonkan untuk dilakukan pergeseran ke Belanja Tidak Langsung khususnya belanja bantuan sosial pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah," terang Ketua Komisi III, I Putu Alit Yandinata.

Secara aturan, pergeseran anggaran dari Belanja Langsung menjadi Belanja Tidak Langsung dimungkinkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada pasal

160 ayat (3) dan ayat (4) serta Permendagri Nomor 32 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Juga Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Alit mengungkapkan, khusus untuk penanggulangan bencana alam longsor Desa Plaga, Semanik, Tiyingan, Sekarmukti, Tinggan dan lingkung-

an jembatan Bangkung akan menggunakan dana tak terduga dengan besaran anggaran mencapai Rp 7,4 miliar lebih.

"Karena dana tak terduga hanya tersedia sejumlah itu, sehingga kami sependapat dengan pemerintah, jika dana tersebut tidak mencukupi bisa memanfaatkan uang kas daerah," terangnya.

Aturan mengacu pada pasal 162 Permendagri Nomor 21/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

khusus ayat (4) huruf b yang menyatakan belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, I Wayan Seraman mengatakan, pemerintah 2017 telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memberi bantuan bagi rumah warga yang terkena bencana. "Masing-masing rumah dianggarkan maksimal Rp 50 juta. Untuk tahun ini ditarget 20 rumah,

acuannya kejadian bencana tahun lalu," katanya.

Dia menjelaskan, syaratnya rumah masyarakat yang terkena bencana milik warga Badung, sehingga pemerintah siap membantu. Namun, untuk warga yang terkena bencana karena kebakaran belum dipastikan akan mendapatkan bantuan. Pihaknya menilai kejadian kebakaran tersebut biasanya diakibatkan kelalaian. Warga yang terkena bencana alam dipastikan mendapat bantuan karena bencana diakibatkan faktor alam. (mpa)

Edisi : Jumat, 5 Mei 2017

Hal : 6